

DPR Tinjau Lokasi Kebakaran Smelter Nikel di Morowali

Komisi VII DPR
RI Bambang
Haryadi meninjau
langsung
lokasi insiden kebakaran di pabrik
pengelolaan dan pemurnian
(smelter) nikel milik PT Gunbuster
Nickel Industry (GNI) di Morowali
Utara, Sulawesi Tengah. Kunjungan
ini untuk memastikan insiden

akil Ketua

yang merenggut dua karyawan perusahaan pada akhir tahun lalu itu apakah akibat kelalaian atau kesalahan teknis.

Adapun hingga saat ini, investigasi masih berlangsung dari pihak berwajib untuk mencari penyebab insiden. "Oleh sebab itu kami ingin mendalami dan mengetahui sejauh mana, peralatan yang di gunakan selama ini oleh pihak PT GNI, apakah perawatan sudah dilakukan sesuai aturan. Maka ini harus diperhatikan pihakpihak terkait, perusahaan dan juga Kementerian Perindustrian selaku pengawas," demikian dikatakan Bambang usai meninjau langsung ke lokasi Kebakaran di Morowali Utara,

Atas kejadian ini, ia juga menekankan kepada semua perusahaan smelter supaya tidak mengenyampingkan keselamatan para karyawannya. "Kita memang membutuhkan investasi, untuk menumbuhkan perekonomian terutama penyerapan tenaga kerja yang besar di Indonesia. Namun perlu menjadi perhatian khusus bagi semua perusahaan smelter tidak boleh semena-mena. Contoh peralatan yang digunakan harus di cek berkala, harus ada lembaga yang dapat melegitimasi, yang dapat

Sulawesi Tengah, Rabu (4/1).



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat meninjau langsung lokasi insiden kebakaran di pabrik pengelolaan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry.

memastikan bahwa semua peralatan layak digunakan," tekan Politisi Partai Gerindra itu.

Kedepannya Bambang minta PT GNI harus lebih mentaati peraturan, mengawasi serta mengevaluasi proses kerja dari semua peralatan yang ada. "Komisi VII mendesak Kemenperin untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT GNI dan smelter lainnya yang berada di seluruh Indonesia. Jangan sampai mereka hanya berorientasi pada keuntungan semata saja namun mengabaikan kualitas peralatan yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa manusia," ujarnya.

Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi VII akan memanggil pihak-pihak terkait yakni PT GNI, Kementrian Perindustrian dan mitra lainnya, guna mendalami berbagai temuan-temuan yang di hasilkan usai kunjungan. "Pasalnya tim Komisi VII DPR RI hari ini hadir mengecek dan memastikan bagaimana kronologis terjadinya kebakaran saja, tidak berarti sudah mendapatkan kejelasan utuh," jelas Legislator Dapil Jawa Timur IV.





DPR Tetap Jalankan Tugas dan Fungsi Konstitusional dengan Baik



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat membacakan pidato di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2022-2023, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2022).

impinan DPR RI berharap walaupun berada dalam tahun politik, parlemen tersebut tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusionalnya sehingga berjalan dengan baik, untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal itu merupakan Pidato Ketua DPR RI dalam rapat paripurna kali ini yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

"Kita memasuki tahun 2023. yang merupakan tahun politik, dimana semua partai politik peserta pemilu 2024 akan melakukan berbagai persiapan dan upaya untuk mendapatkan suara rakyat, termasuk Anggota DPR RI. Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik, kita dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional

DPR RI tetap berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat; mensejahterakan rakyat; dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," ujar Rachmat Gobel di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2022-2023, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Ditambahkannya, Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka diperlukan Pelaksanaan Pemilu yang berkualitas.

"DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal Pemilu tahun 2024 mendatang yang demokratis, jujur dan adil," tegas Gobel. - ayu/aha



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANADr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media) Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

Andi Nufu Nauvai Karmadnina, A.M.D.IS

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti,
S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Ernilson, S.Sos,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom, Ubaid
Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom, Rahayu Setyowati,
Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi
Setianto, Taufan Syahnulii, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani,
Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leomaricha Firsta Dysie,
Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

DESAIN GRAFISDito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa S Kom Savant Rifni Hidavat S E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email: bag_penerbitan@dpr.go.id

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERM<u>intaan Hasil</u> CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



DPR Akan Soroti **Lima Permasalahan di 2023 Mulai Dari Bencana Hingga Pemilu**



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023)

alam rangka menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI pada tahun 2023 akan fokus menyoroti pada beberapa kebijakan, isu, dan permasalahan di berbagai bidang yang perlu dijadikan perhatian. Isu-isu yang menjadi sorotan ini tidak lepas dari masa penyesuaian dari pandemi covid-19 dan juga persiapan menghadapi tahun politik pada tahun 2024.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, setidaknya terdapat lima isu permasalahan yang menjadi perhatian oleh DPR RI. Yakni, permasalahan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah akibat cuaca ekstrem, penyesuaian aktivitas masyarakat setelah kebijakan PPKM tidak berlaku, permasalahan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk anak, permasalahan tenaga honorer, dan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu.

"Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan, akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran berjalan dan dapat memajukan Indonesia di berbagai sektor," ujar Rachmat Gobel saat membacakan Pidato Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Tak hanya itu, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPR RI juga diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan. DPR RI juga akan terus berupaya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kolaborasi dengan mitra kerja dan pemerintah.

"DPR RI juga akan menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat, baik melalui rapat bersama mitra kerja maupun rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, tim pemantau, maupun tim pengawas DPR RI. DPR RI akan mendorong Kementerian dan Lembaga untuk bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah. Sehingga, rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, dan menyejahterakan rakyat," ucap Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Perindustrian dan Pembangunan (Korinbang) itu. **gal/rdn**





Pemerintah Diharapkan **Beri Pupuk Bersubsidi untuk Petani Tambak**

nggota DPR RI Khilmi meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk meninjau kembali regulasi pencabutan subsidi pupuk. Sebab, diketahui dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, penyaluran pupuk bersubsidi saat ini hanya diperuntukan terbatas pada sembilan komoditas. Yakni, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

Selain komoditas tersebut, petani tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut, menurut Khilmi, membuat petani tambak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat membuat regulasi baru untuk juga menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani tambak.

Demikian disampaikannya saat interupsi dalam Rapat Paripurna
DPR RI DPR RI Ke-14 Masa
Persidangan III Tahun Sidang 2022 2023 dengan agenda Pidato Ketua
DPR RI Pada Pembukaan Masa
Persidangan III Tahun Sidang 20222023 Selasa, di Gedung Nusantara
II, Senayan, (10/1).

"Di Dapil saya ini, Pak. Sekarang petani tambak dan petani padi lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena regulasi di Kementerian Pertanian itu sudah dicabut. Padahal anggaran yang diberikan kepada petani tambak sudah dianggarkan di Komisi IV,



Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI DPR RI Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 - 2023 dengan agenda Pidato Ketua DPR RI Pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Selasa (10/01/2023).

tetapi regulasi untuk penyaluran di Kementerian Pertanian ini belum ada," ujarnya Khilmi.

Untuk itu, ia berharap keluhan masyarakat khususnya di Dapilnya, yakni Gresik dan Lamongan, serta petani tambak seluruh Indonesia dapat didengar dalam rapat paripurna. Sehingga, segera ada regulasi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi bagi petani tersebut.

"Mohon kiranya melalui Rapat
Paripurna ini semoga pemerintah
cepat mengeluarkan regulasi untuk
penyaluran pupuk bersubsidi bagi
petani tambak dan petani padi yang ada
di indonesia khususnya di Dapil saya
Gresik dan Lamongan," harap Politisi
Fraksi Partai Gerindra ini. • bia/rdn



Christina Aryani Ingatkan Konsistensi Perlindungan PMI

nggota Komisi I DPR
RI Christina Aryani
mengingatkan
konsistensi
perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI). Dia meyakini
komitmen perlindungan PMI di
Malaysia akan lebih optimal usai
pertemuan Presiden Joko Widodo
dengan Perdana Menteri (PM)
Malaysia Anwar Ibrahim Senin lalu.

"Pertemuan kedua pemimpin tersebut ada langkah maju karena tampak komitmen kuat pihak Malaysia untuk menempatkan isu perlindungan PMI jadi prioritas. Hanya saja komitmen harus diikuti sikap konsistensi, bukan saja dari Malaysia tetapi juga Indonesia," kata Christina dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Rabu (11/1).

Menurut dia, komitmen Malaysia untuk memastikan jaminan perlindungan PMI dari segala bentuk perlakuan tidak adil, kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dia mengingatkan bahwa komitmen tersebut harus diikuti dengan sikap konsisten kedua pemimpin untuk benar-benar membenahi sistem rekrutmen hingga pemberangkatan PMI.

Christina menilai komitmen politik yang disampaikan Anwar Ibrahim menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk melakukan penataan optimal pengiriman PMI ke Malaysia termasuk implementasi "One Channel System" untuk perekrutan dan penempatan. "Malaysia sudah tahu ini, soal serius dan paham posisi Indonesia, jujur saja Malaysia punya ketergantungan sangat kuat pada PMI. Maka menjadi kesempatan Indonesia membenahi secara serius," ujarnya.

Dia menjelaskan di level implementasi dan konsistensi harus menjadi catatan serius setelah pertemuan kedua pemimpin. Menurut dia, komitmen politik sudah jelas, maka selanjutnya



PERTEMUAN KEDUA
PEMIMPIN TERSEBUT
ADA LANGKAH MAJU
KARENA TAMPAK
KOMITMEN KUAT PIHAK
MALAYSIA UNTUK
MENEMPATKAN ISU
PERLINDUNGAN PMI JADI
PRIORITAS...

terkait mengawal implementasi dan konsistensinya. "Indonesia dan Malaysia keduanya perlu komitmen serius untuk berantas praktik mafia pengiriman PMI ilegal. Ini awal atau pangkal persoalan yang harus diselesaikan, tanpa itu maka komitmen kedua pemimpin tidak punya dampak apa-apa," ucapnya.

Christina berharap usai pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Anwar, praktik-praktik perekrutan dan penempatan melalui agenagen "nakal" bisa diberantas habis. Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus sama-sama memastikan sistem perekrutan dan penempatan melalui "One Channel System" benarbenar berjalan dan tidak ada lagi jalur-jalur ilegal.





Komisi II Minta MK Libatkan Parpol Terkait Gugatan Sistem

Proporsional Terbuka

akil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa berharap Mahkamah Konstitusi (MK) melibatkan Partai Politik (parpol) dalam gugatan Judicial Review UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait Sistem Proporsional Terbuka. Saan mengungkapkan, pelibatan itu sebagai upaya mempertahankan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. Sebab, menurutnya DPR dan pemerintah sepakat tidak akan mengubah UU Pemilu.

"Kita nanti meminta MK mengikutsertakan parta-partai sebagai pihak terkait. Kita berharap MK nanti ketika berproses mendengar semua pihak di parlemen karena kita ingin Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu 2024," kata Saan Mustopa dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria, Rabu (4/1).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai pelibatan partai politik dinilai penting dipertimbangkan MK. Sebab, MK bisa mendengar pandangan partai dalam mengambil keputusan terhadap penerapan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. "Pandangan masingmasing partai itu tentu MK bisa mempertimbangkan semuanya dalam mengambil keputusan," kata Saan.

lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga menegaskan pihaknya ingin Sistem Proporsional Terbuka dipertahankan. Sebab, hal ini merupakan langkah maju penyelenggaraan demokrasi. "Kalau kembali ke proporsional tertutup





KITA NANTI
MEMINTA MK
MENGIKUTSERTAKAN
PARTA-PARTAI SEBAGAI
PIHAK TERKAIT. KITA
BERHARAP MK NANTI
KETIKA BERPROSES
MENDENGAR SEMUA
PIHAK DI PARLEMEN
KARENA KITA INGIN
SISTEM PROPORSIONAL
TERBUKA DI PEMILU
2024

bentuk kemunduran demokrasi," sambungnya.

Saan membeberkan alasan
Sistem Proporsional Tertutup
dianggap sebagai kemunduran. Salah
satunya, tidak merepresentasikan
sistem perwakilan. Menurut Saan,
penentuan anggota legislatif
pada Sistem Proporsional
Terbuka ditentukan langsung oleh
masyarakat pemilih, sedangkan pada
proporsional tertutup tergantung
partai. "(Sistem) Proporsional
Tertutup membuat masyarakat tidak
mendapatkan hak untuk menentukan
siapa wakil yang mereka anggap
terbaik bisa mewakilinya," tutupnya.

→ we/rdn



Aparat Penegak Hukum Didesak

Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan

nggota Komisi III DPR
RI Moh. Rano Alfath
turut mempertanyakan
adanya keterlibatan
mafia beras dalam
kebijakan impor beras sebanyak
ratusan ribu ton yang dilakukan
Pemerintah pada akhir bulan
Desember tahun 2022. Menurut
Rano, diperlukan ada keterlibatan
Aparat Penegak Hukum untuk
mengawasi maupun melakukan
investigasi terkait dugaan adanya
permainan mafia pangan tersebut.

"Kebijakan impor beras ini sedang ramai disoroti masyarakat. Untuk itu, saya turut meminta Aparat Penegak Hukum baik Polri maupun Kejaksaan untuk turun tangan meningkatkan pengawasan dan bila perlu tindaklanjuti dugaan-dugaan adanya permainan dalam impor beras. Segera gerak cepat dan proses



... SEGERA GERAK CEPAT DAN PROSES HUKUM APABILA TERBUKTI ADA MAFIA-MAFIA YANG TERLIBAT, KITA TUNJUKKAN BAHWA NEGARA TIDAK MAIN-MAIN SOAL KETAHANAN PANGAN KARENA INI MENYANGKUT HAJAT HIDUP BANYAK ORANG hukum apabila terbukti ada mafiamafia yang terlibat, kita tunjukkan bahwa negara tidak main-main soal ketahanan pangan karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang," tegas Rano dalam rilis yang diterima **Parlementaria**, Rabu (4/1).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
itu lantas meminta negara belajar
dari berbagai macam kebijakan
impor pangan yang berujung tindak
pidana diantaranya seperti mafia
minyak goreng, kasus impor garam,
dan lain-lain. Mengingat, ungkap
Rano, masyarakat dan petani kita
nasional merupakan korban utama
dalam kasus mafia pangan ini.

"Untuk itu, kita harus ekstra hati-hati dan lakukan pengawasan ketat terkait impor beras ini jangan sampai dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bila perlu bentuk satgassatgas terkait agar penegakan hukumnya lebih optimal," pungkas Legislator Daerah Pemilihan Banten III tersebut.

Sebelumnya diberitakan,
Pemerintah memutuskan untuk
mengimpor beras sebanyak
500 ribu demi memperkuat stok
Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
yang ditargetkan sebanyak 1,2
juta ton pada akhir tahun 2022.
Diharapkan dengan tambahan
beras impor tersebut dapat
memenuhi kebutuhan selama
Januari-Februari 2023 yang
hitunganya masih defisit antara
produksi dan konsumsi.









Komisi III Dukung Rencana Penerapan Kembali Tilang Manual

akil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merespons rencana Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Santyabudi yang mempertimbangkan penerapan kembali tilang manual. Sahroni pun menyatakan setuju diberlakukan kembali kebijakan tilang manual tersebut, karena rendahnya kedisiplinan pengendara di jalan raya. Menurutnya, hal itu mewanti-wanti masyarakat agar taat aturan selama berkendara.

"Selama pemberlakuan penuh tilang elektronik (e-tilang), banyak masyarakat yang coba mengakali aturan. Hal seperti itu yang membuat disiplin pengguna jalan jadi jeblok. Ini semua agar pengendara kembali normal dan taat kepada aturan," ungkap Sahroni melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria, Selasa (3/1).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan personel Korlantas Polri agar menjalankan tugas dengan baik. Jangan sampai, tegasnya, praktik Pungutan Liar (pungli) terjadi saat tilang manual dilakukan. "Jika tilang manual kembali diterapkan, saya ingin anggota polisi yang bertugas di lapangan harus bisa lebih profesional," tukasnya.

Lebih lanjut, Legislator Dapil DKI Jakarta III itu juga meminta Polri tidak segan-segan segera menindak jika ada temuan pungli atau penyelewengan lainnya di jalan. Jika perlu, mereka harus diberikan sanksi tegas. "Sudah tidak ada lagi cerita polisi main mata di lapangan. Ketahuan pungli risiko langsung pecat, biar *fair*," sambungnya.





SELAMA PEMBERLAKUAN PENUH TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG), BANYAK MASYARAKAT YANG COBA MENGAKALI ATURAN. HAL SEPERTI ITU YANG MEMBUAT DISIPLIN PENGGUNA JALAN JADI JEBLOK. INI SEMUA AGAR PENGENDARA KEMBALI NORMAL DAN TAAT KEPADA ATURAN

Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi menyampaikan alasan polisi akan memberlakukan kembali tilang manual karena sejak sistem penindakan tersebut dihapuskan, kesadaran pengendara untuk diharapkan tertib, nyatanya tidak muncul. Justru penerapan e-tilang membuat pengguna jalan raya melakukan pelanggaran baru. Seperti mencopot plat kendaraan saat tilang manual ditiadakan. Hal lainnya adalah karena meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas selama Operasi Lilin 2022 pada 23 Desember 2022-2 Januari 2023. - we/rdn



Legislator Soroti

Minimnya Porsi Anggaran Irigasi

nggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti minimnya alokasi anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebesar Rp3.100.741.155.000. Minimnya alokasi anggaran di Ditjen PSP itu jika dibandingkan dengan alokasi anggaran di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp15,5

triliun.

"Ditjen PSP ini kan ada program pembangunan irigasi tersier. Anggarannya kecil, tapi mestinya volumenya banyak. Seharusnya, anggaran pembangunan irigasi ini tidak lebih kecil dari anggaran bendungan PUPR yang sebesar Rp15,5 triliun. Namun kenyataannya, Pengelolaan air irigasi pertanian yang semula Rp905,7 miliar malah turun Rp736,53 miliar," kata Andi dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria pada Rabu (11/1/2023).

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan untuk tercapainya ketahanan pangan nasional sebagai kunci untuk menghadapi ancaman krisis pangan. Namun menurut Andi, upaya menuju pembangunan pangan yang kokoh di tanah air ini masih jauh dari harapan. Hal itu dibuktikan dengan pembangunan bendungan yang terus berjalan



Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

hingga 61 (enam puluh satu) titik bendungan yang menjadi terobosan pengelolaan sumber daya air yang dinilai belum cukup.

Menurut Politisi Fraksi PKS itu sumber daya air bukan hanya untuk kebutuhan air minum, dan kebutuhan hajat hidup orang banyak, melainkan juga menjadi penopang utama sarana pendukung pertanian. Untuk itu, keterjangkauan pengairan yang baik bagi lahan pertanian yang banyak tersebar, juga memerlukan prioritas dalam sistem pengairannya. Hal itu, lanjutnya, akan dapat dipenuhi dengan irigasi tersier.

"Saya sudah berkeliling di berbagai daerah, baik di dapil maupun di luar dapil melalui kunjungan kerja komisi, bahwa setiap daerah sentra pertanian yang memiliki irigasi tersier, produktivitas pertanian di desa sentra pertanian terus melonjak naik, sehingga kesejahteraan petani berangsur membaik. Ini bukti nyata bahwa irigasi tersier memang sangat bermanfaat bagi masyarakat petani," tuturnya.

Andi Akmal pun mempertanyakan komitmen pemerintah untuk merealisasikan ketahanan pangan nasional dengan politik anggaran yang kurang proporsional terhadap alokasi belanja anggaran untuk mendukung pertanian. Meskipun Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Indonesia sebesar Rp95 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pada kenyataannya, alokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 hanya sebesar Rp15.318.655.827.000.

"Sudah saatnya pemerintah berpikir, agar mayoritas alokasi anggaran ketahanan pangan Indonesia yang sebesar Rp95 triliun ini ada di Kementan. Bila masih pada kondisi saat ini, akan menjadi bukti bahwa pemerintah masih belum serius menjadikan negara ini memiliki kekuatan pangan yang tangguh secara substansial," tegas Legislator Dapil Sulawesi Selatan II itu. **gal/rdn**





Edukasi Waspada Bencana Harus Menjangkau ke Seluruh Lapisan Masyarakat

aat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedana menuju puncak musim penghujan yang diprediksi akan berlangsung pada Januari hingga Februari 2023. Prakiraan cuaca vang dikeluarkan BMKG ini mengacu pada data keluaran model numerik cuaca. Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menegaskan agar pemerintah memberikan edukasi dan informasi soal kebencanaan nasional, mengingat posisi geografis Indonesia yang cukup rawan.

"Memang terasa sekali bahwa cuaca ekstrim itu memang luar biasa. Artinya ini harus meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Kemudian tadi koordinasi lintas stakeholder harus ditingkatkan, dan edukasi terhadap bencana kepada masyarakat harus semakin masif, sava kira itu," papar Mulyadi saat diwawancarai Parlementaria di Jakarta, Rabu (4/1).

Komisi V DPR RI sebagai kinerja para mitranya yang memiliki tanggung jawab atas kebencanaan memberikan perhatian serius soal

pemangku kepentingan mengawasi Anggota Komisi V DPR RI

kebencanaan. Mulyadi meminta agar para mitra kerja Komisi V bisa menjaga sinergitas dan berkoordinasi dengan baik sehingga layanan kepada masyarakat benar-benar efektif dan melindungi dari ancaman bencana.

"Bencana di Indonesia bukan hal vang luar biasa, dirasakan oleh banyak daerah. Masyarakat harus selalu waspada. Yang terpenting stakeholder harus betul-betul bisa menjaga sinergitas dan berkoordinasi dengan baik," jelas Mulyadi.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, penting bagi masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang kebencanaan secara jelas dan menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Dia menjabarkan agar penyebaran informasi tidak hanya pada kanal digital saja, bahkan harus ada bentuk fisiknya karena di beberapa pelosok daerah belum bisa menjangkau informasi berbasis diaital.

"Jadi pada saat rapat persiapan nataru bersama dengan Kementerian PUPR, Perhubungan, Kakorlantas, bersama dengan BMKG dan Basarnas. Saya mengingatkan terutama kepada Basarnas lebih meningkatkan kewaspadaan. Bahkan saya sampaikan kepada ibu Rita sebagai kepala BMKG. Supaya kalau perlu informasi-informasi itu dicetak. jadi jangan sampai hanya informasi di sosial media. Karena tidak semua daerah bisa mengakses informasi digital. Maka saya kira aturanaturan untuk waspada bencana ada instrumen fisik, terutama di desadesa," tandas Mulyadi. --- ssb/aha

Mulyanto Tidak Rekomendasikan Pemerintah Perpanjang Izin PT Vale dengan Pengecualian

nggota Komisi VII DPR RI Mulyanto tidak merekomendasikan Pemerintah memperpanjang izin operasional PT. Vale yang akan habis dalam jangka waktu dekat. Mulyanto meminta PT. Vale harus memperbaiki komitmen perbaikan kinerja hilirisasi dan meningkatkan kontribusi bagi Pemda dan masyarakat setempat, sebagai syarat perpanjangan izin operasional.

"Komisi VII DPR RI bulan lalu pernah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tiga gubernur dari Sulawesi, yakni Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi

Tenggara. Semua

menolak keras

perpaniangan

izin PT Vale ini.

Alasannya,

kontribusi

perusahaan

aubernur

Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (9/1). Mulvanto menielaskan, bila izin operasional PT. Vale tidak

ini sedikit sekali untuk Pemda dan

masyarakat sekitar tambang," terang

diperpanjang, maka wilayah pertambangannya, secara prioritas akan diserahkan kepada BUMN/ BUMD. Jadi tanpa akuisisi, atau dengan kata lain seratus persen saham perusahaan tersebut otomatis akan meniadi milik BUMN/BUMD. Sementara, bila diberikan perpanjangan, maka sesuai UU Minerba, semestinya saham Indonesia menjadi mayoritas 51 persen. Adapun tambahan

> akurat. Jangan sampai ada mark up saham, agar uang

Anggota Komisi VII

DPR RI Mulyanto.

sahamnya, wajib dibeli pemerintah. "Hitung-hitungannya harus

negara tidak tersedot. Juga terkait sumber pendanaan MIND-ID untuk mengakuisisi saham tersebut. Pengalaman dari kasus akuisisi PT Freeport Indonesia yang lalu harus dipelaiari sunaguh-sunaguh." tandas Politisi Fraksi PKS ini.

Selama ini, kata Mulyanto, Komisi VII DPR RI banyak menerima masukan dari masyarakat terkait kinerja PT. Vale. Umumnya, mereka mengeluhkan keberadaan PT. Vale yang dinilai tidak komitmen pada peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat kurang merasakan manfaatnya.

Diketahui, kontrak pertambangan bagi Vale Indonesia akan berakhir pada Desember 2025. PT Vale sendiri belum mengajukan izin perpanjangan kontrak. Sebelumnya, penolakan untuk perpanjangan izin PT Vale Indonesia menguat dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI dengan gubernur dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi

Ketiga gubernur ini kompak menyatakan aspirasi tidak akan memberikan opsi perpanjangan kontrak pertambangan bagi PT Vale Indonesia yang akan berakhir pada Desember 2025. Sejumlah penolakan ini muncul mulai dari kontribusi yang dinilai masih minim, besarnya lahan yang idle atau tidak tergarap, hingga belum diselesaikannya kewajiban terhadap lingkungan hidup.







Ace Hasan: Pendisiplinan Siswa Harus Dilakukan dengan Humanis dan Edukatif



Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzili menekankan proses pendisiplinan siswa harus dilakukan dengan cara humanis dan edukatif. Hal itu Ace sampaikan menyusul kasus Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Islam di Gresik, Ahmad Nasrullah (51) yang melakukan pemukulan terhadap 15 orang siswi di lingkup Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Islam di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur.

akil Ketua

Menurut Ace, mendisiplinkan peserta didik dengan kekerasan sudah tidak zamannya lagi. "Tindakan hukuman dengan



TINDAKAN **HUKUMAN DENGAN MELAKUKAN PEMUKULAN APALAGI MENYEBABKAN** BEBERAPA DIANTARANYA **PINGAN JELAS MERUPAKAN** TINDAKAN YANG TIDAK DIBENARKAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

melakukan pemukulan apalagi menyebabkan beberapa diantaranya pingan jelas merupakan tindakan yang tidak dibenarkan di lingkungan pendidikan," ungkapnya barubaru ini.

Untuk itu, Legislator Fraksi Partai Golkar itu, kasus pemukulan yang menyebabkan beberapa diantaranya pingsan diselidiki secara hukum. "Tindak kekerasan yang menimbulkan traumatik terhadap korban sebaiknya diproses (hukum) saja," katanya.

Untuk diketahui, Kepala Polres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis mengatakan, penetapan tersangka terhadap pria yang menjabat sebagai kepala MTs Nurul Islam tersebut berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihaknya.

Dari hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, tersangka terbukti melakukan tindak kekerasan dengan cara memukul para korban dalam kejadian Selasa (3/1/2023) tersebut. Dimana, dari 15 korban, empat orang di antaranya sempat pingsan pada saat kejadian.

"Kita terapkan Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan), serta atau Undang Undang nomor 17 tahun 2016 atas perubahan Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diancam hukuman sekitar 3,5 tahun penjara," kata Nur Azis.

nm/aha

Ashabul Kahfi: Pentingnya Mitigasi Bencana Bagi Indonesia



etua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menverukan perlunva menggencarkan sosialisasi mitigasi bencana mengingat Indonesia saat ini seringkali mengalami perubahan cuaca dan iklim ekstrem yang terjadi secara mendadak. Kondisi itupun, lanjut Ashabul Kahfi kerap berujung pada bencana hidrometeorologis.

"Mitigasi bencana ini sangat penting dilakukan untuk keselamatan seluruh warga. Walaupun ada bencana yang tak bisa dihindari seperti gempa bumi, namun dengan mitigasi bencana yang maksimal, dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin," katanya saat dihubungi Parlementaria, Selasa (3/1).

Secara Geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang



MITIGASI BENCANA INI SANGAT PENTING **DILAKUKAN UNTUK KESELAMATAN** SELURUH WARGA. WALAUPUN ADA **BENCANA YANG** TAK BISA DIHINDARI SEPERTI GEMPA BUMI. **NAMUN DENGAN** MITIGASI BENCANA YANG MAKSIMAL. DAMPAKNYA BISA **DITEKAN SEMINIMAL MUNGKIN**

terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Benua Indo-Australia. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Selain itu. Indonesia terletak di zona Ring of Fire dimana terdapat banyak sekali gunung api aktif. Aspek geografis ini menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa bumi dan

"Namun hal ini tentu bisa dimitigasi, misalnya dengan memperbanyak alat deteksi gempa bumi dan tsunami di beberapa wilayah Indonesia serta melakukan sosialisasi pada warga terkait apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana," katanya.

Karena wilayah Indonesia yang sangat luas, la meminta sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perlu diperkuat. "Saya lihat komitmen Pemerintah Daerah belum sirama, perlu penguatan pola relasi Pusat dan Daerah dalam antisipasi bencana," katanya.

Kepada masvarakat, la menghimbau agar siap siaga dan selalu ikuti perintah dan petunjuk dari pihak berwenang, terutama jika Anda berada di area yang ditetapkan sebagai zona merah atau zona rawan bencana.

"Siapkan diri dengan mengikuti perkembangan informasi terkait bencana media massa, siaran radio, dan aplikasi pemberitahuan bencana. Selalu ikuti perintah dan petunjuk dari pihak berwenang, terutama jika Anda berada di area yang ditetapkan sebagai zona merah atau zona rawan bencana, dan iangan lupa untuk menyimpan nomor telepon penting seperti nomor darurat, pihak berwenang, dan keluarga di ponsel, tutupnya. -- rmn/aha





Pemerintah Diminta Siapkan Transisi Menuju Endemi Usai PPKM

Dicabut

akil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan pencabutan status PPKM harus diikuti dengan roadmap yang jelas untuk kesiapan transisi dari pandemi menuju endemi. Hal ini disampaikan Kurniasih menyusul keputusan pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022.

Kurniasih mengatakan, meski wewenang pencabutan status pandemi dimiliki oleh WHO, pemerintah perlu memikirkan roadmap yang jelas transisi menuju endemi dengan pendekatan evidencebased policy. "Lewat pencabutan PPKM, masyarakat tidak lagi dibatasi dalam menyelenggarakan kegiatan vang bersifat kerumunan. Namun. meski status PPKM dicabut, status endemi dan status bencana nasional non alam masih berlaku," ungkap Kurniasih dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (3/1).

Politisi dari F-PKS ini meminta kepada pemerintah untuk lebih menjelaskan secara detail apa saja hal-hal yang diperbolehkan dengan pencabutan PPKM dan apa saja peraturan yang masih berlaku meski status PPKM dicabut.

"Publik perlu diberikan pemahaman yang utuh. Di satu sisi kita bersyukur masyarakat bisa melakukan bisa menggelar kegiatan yang bersifat massal. Di sisi lain masih ada beberapa peraturan antisipasi





LEWAT PENCABUTAN PPKM. MASYARAKAT TIDAK LAGI DIBATASI DALAM **MENYELENGGARAKAN KEGIATAN** YANG BERSIFAT KERUMUNAN, NAMUN, MESKI STATUS PPKM DICABUT, STATUS **ENDEMI DAN STATUS** BENCANA NASIONAL NON ALAM MASIH **BERLAKU**

Covid-19 yang masih tetap berlaku karena status Pandemi belum dicabut, Covid-19 sebagai bencana nasional non alam juga belum dihentikan," ungkap Kurniasih.

Misalnya peraturan wajib booster bagi pelaku perjalanan jarak jauh masih berlaku meski status PPKM sudah dicabut. Imbauan untuk tetap memakai masker di tempat umum, penggunaan PeduliLindungi, status Satgas Covid-19 masih berjalan dan sebagainya.

"Artinya perlu penjelasan yang lengkap tentang apa saja hal-hal yang diperbolehkan usai status PPKM dicabut dan yang masih dilarang karena Pandemi belum selesai. Ingat PPKM selesai bukan berarti Pandemi juga selesai," tandas Kurniasih. aan/aha



Pemerintah Diminta Sediakan Vaksin Covid-19 Untuk Anak

nggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan RL untuk segera menyediakan vaksin Covid-19 untuk anak. Sebagaimana dikabarkan, vaksin Covid-19 untuk anak saat ini sedang kosong. Sementara, pelaksanaan vaksinasi untuk anak masih belum selesai.

Saleh mengatakan, kebutuhan terhadap vaksin Covid-19 untuk anak ini penting. Apalagi, penyebaran virus Covid-19 dengan berbagai variannya masih terjadi. Sisi lain, China saat ini sedang mengalami lonjakan kasus varian baru Covid-19.

"Saya mendengar, kementerian kesehatan saat ini sedang menunggu vaksin buatan dalam negeri. Itu tentu sangat baik dan bijak. Tetapi, untuk mengisi kekosongan yang terjadi saat ini, pemerintah harus mencari alternatif. Kita juga dikejar oleh waktu agar jadwal vaksinasi sesuai dengan yang semestinya," ungkap Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (3/1).

Saleh menyampaikan, dalam rapat terakhir, Kementerian Kesehatan dan produsen vaksin merah putih memang telah menyanggupi pengadaan vaksin. "Mestinya, itu sudah ada sekarang. Kalau belum, berarti ada kendala. Kita perlu menelusuri apa kendalanya untuk diselesaikan," katanya.

Di lain pihak, BPOM juga sudah memberikan izin vaksin Pfizer untuk disuntikkan pada anak. Tetapi sampai sekarang, belum dilaksanakan. Masih menunggu



SAYA MENDENGAR. **KEMENTERIAN KESEHATAN SAAT INI** SEDANG MENUNGGU VAKSIN BUATAN DALAM **NEGERI. ITU TENTU** SANGAT BAIK DAN BIJAK. TETAPI. UNTUK **MENGISI KEKOSONGAN** YANG TERJADI SAAT INI. **PEMERINTAH HARUS** MENCARI ALTERNATIF...

proses penilaian dari ITAGI. "Kerjakerja seperti ini memang harus kolektif kolegial. Semua yang terlibat harus berperan aktif dan cepat. Proses birokrasinya pun jangan sampai memperlambat dan menunda pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Menutup keterangannyan, Saleh mengingatkan vaksinasi untuk anak itu sangat penting. Sebab, kekebalan mereka terhadap penyakit harus diutamakan. Masa pertumbuhan dan sekolah adalah hal yang sangat krusial. Karenanya, pemerintah harus betul-betul memperhatikan dan memprioritaskan mereka.

aan/aha





Syaiful Huda: Pernyataan Menkopolhukam terkait Kanjuruhan Terlalu Dini



etua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pernyataan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidana Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait tragedi Kanjuruhan adalah terlalu dini. Ia menyesalkan hal tersebut lantaran Mahfud MD menyebut bahwa tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

"Biasanya sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan untuk

disampaikan bahwa ini melanggar HAM berat dan tidak, itu kan biasanya berpuluhpuluh tahun dulu," ujar Huda dalam rilis yang diterima tim Parlementaria, Minggu (1/1). la menilai pernyataan itu tidak tepat disampaikan saat ini, terutama ketika para korban merasa penanganan tragedi itu belum sesuai ekspektasi.

Menurutnya, hal itu seperti menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpihak pada korban soal pengungkapan perkara ini. "Dari

pemerintah sendiri dari pada level hukumnya, dianggap oleh para korban dan publik sepak bola juga masih jalan di tempat," lanjut Politisi Fraksi PKB ini.

Oleh karenanya, Huda merasa keberatan atas pernyataan Mahfud tersebut. "Jadi pada umumnya enggak tepat, dan menurut sava enggak perlu disampaikan dalam yang sangat dekat ini," katanya. Diketahui, tragedi Kanjuruhan yang berlokasi di Malang, Jawa Timur tersebut mengakibatkan 134 orang meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pasca pertandingan antara Arema Malang kontra Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022.

Adapun kemudian Mahmud MD dalam kunjungannya ke Ponpes Miftahussunnah, Surabaya, mengungkapkan tragedi Kanjuruhan bukan merupakan pelanggaran HAM Berat. Di sisi lain, pihak kepolisian diketahui telah melimpahkan berkas perkara lima dari enam tersangka tragedi Kanjuruhan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Kelimanya adalah Ketua Panpel Arema Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno dan tiga anggota Polri, yaitu, Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Wahyu Kompol Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Sedangkan seorang tersangka lain, yakni Dirut PT LIB Hadian Lukita berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap, dan dikembalikan lagi kepada penyidik.

hal/aha

Ulah Suporter di GBK, Dede Yusuf: Men-'downgrade' Sepak Bola yang Sudah Membaik

elum lama ini media sosial diramaikan aksi suporter menaiki stand sound system saat pertandingan Indonesia melawan Thailand dalam Piala AFF di Gelora Bung Karno (GBK). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai aksi vang dilakukan oknum tersebut merendahkan sepak bola Indonesia

"Perbuatan seperti ini mendowngrade sepak bola yang sedang baik, dan mulai memiliki citra internasional," ujar Dede dalam keterangan yang diterima tim Parlementaria, Senin (1/1). Lebih lanjut Dede menyebut perbuatan tersebut adalah salah. Sebab, dalam Undang-undang Keolahragaan, segala perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan suporter lain dilarang.

"Rasanva sekarang sudah ada Peraturan kapolri yang baru, tentang penanganan suporter. Dan sudah harus dimulai sanksi-sanksi yang membahayakan seperti ini," ungkap politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Dede pun menilai, jumlah steward perlu ditambah saat laga timnas Indonesia.

Meski begitu, tambah Dede, kesadaran suporter untuk tidak melakukan aksi provokatif dan membahayakan penonton lainnya adalah yang utama. "Memang perlu peningkatan kesadaran suporter, dari yang brutal menjadi terpelajar dan taat aturan. Di luar negeri juga sama dilakukan capacity building oleh klub dan suporter." kata Dede.

Selain itu Dede menambahkan, panitia pelaksana (panpel) juga perlu



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.

memberikan sanksi yang tegas kepada suporter vang melakukan pelanggaran, misalnya dalam bentuk denda atau hukuman. "Dan sanksi itu harus terbaca di setiap sudut. Dengan

MEMANG PERLU PENINGKATAN KESADARAN SUPORTER. **DARI YANG BRUTAL MENJADI TERPELAJAR** DAN TAAT ATURAN. DI LUAR NEGERI JUGA SAMA DILAKUKAN CAPACITY **BUILDING OLEH KLUB DAN SUPORTER**

juga memasang CCTV sehingga bukti tidak dari HP penonton saia." lanjutnya.

Sebelumnya, beredar video viral yang memperlihatkan seorang suporter yang mengenakan pakaian putih menaiki stand sound system saat laga berlangsung. Dalam video tersebut, terlihat dia berteriak dan berjoget di sana. Dalam video tersebut juga terdengar suporter lainnya mengingatkan pria tersebut untuk turun. Terlihat juga beberapa orang lainnya menghampiri pria tersebut dan menyuruhnya turun.

Alih-alih turun, pria tersebut justru masih bertengger di sana sambil berioget. Bahkan terlihat juga gestur tubuhnya seakan menyuruh mereka yang mengingatkan untuk diam dan tak mempermasalahkan aksinya tersebut. hal/aha





PPKM Dicabut, Pelaku Pariwisata Harus Segera Tangkap Momentum

emerintah diketahui secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Langkah pencabutan PPKM tersebut dinilai perlu mengingat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 selama 11 bulan terakhir. Kebijakan pembebasan tersebut disinyalir akan memberikan dampak positif terhadap beberapa sektor, diantaranya sektor pariwisata Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Siaifudian menilai korelasi pencabutan PPKM dengan peningkatan capaian pariwisata Indonesia pada tahun 2023. Menurutnya, ada tiga faktor faktor dalam pencabutan PPKM yang dapat mendorong geliat pariwisata. Pertama, pencabutan PPKM berarti pembebasan mobilitas masyarakat serta kuota destinasi wisata, tentu hal ini meningkatkan minat wisatawan. Kedua, secara psikologi, masyarakat pada umumnya telah haus akan berwisata selama beberapa tahun terakhir.

Ketiga, pencabutan PPKM menyiratkan pemerintah telah berhasil menangani Covid-19, hal ini meningkatkan rasa aman pada wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. "Karenanya, dicabutnya PPKM dapat disikapi sebagai momentum tepat untuk melepas dahaga wisata para wisatawan," katanya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (4/1/2023).

Namun, Hetifah yang pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata DPR RI ini juga memberikan catatannya.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Menurutnya, tanpa langkah cerdas. pelaku wisata dapat kehilangan momentum ini. Maka dari itu ia memaparkan bahwa ada empat langkah yang harus diperhatikan para pelaku usaha wisata. Pertama, tren wisata kini sangat memperhatikan aspek keamanan dan kebersihan sehingga standar CHSE harus diimplementasikan dengan baik.

Kedua, pemasaran paket wisata harus betul-betul memanfaatkan sosial media mengingat semakin bergantungnya masyarakat terhadap info dari dunia digital. Ketiga, fasilitas dan amenitas yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti fasilitas MCK, hotel, tempat ibadah, restoran, tempat oleh-oleh, hingga sarana transportasi. Keempat, di era

persaingan setelah Covid-19 ini. inovasi produk-produk wisata harus terus diciptakan agar dapat memenangkan pasar.

Untuk diketahui, pada tahun 2022, meski masih dalam masa ketidakpastian Covid-19, pariwisata Indonesia telah menunjukkan taringnya untuk pulih dari keterpurukan dan kembali merajai pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai capaian positif pariwisata Indonesia tahun 2022 yang diantaranya peningkatan atas nilai devisa pariwisata, kontribusi PDB pariwisata, iumlah wisatawan mancanegara (Wisman) dan nusantara (Wisnus), dan jumlah tenaga kerja Parekraf.

nm/aha



Puteri Komarudin Apresiasi

Keberhasilan KPC-PEN Kendalikan



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.

residen RI Joko Widodo resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pada Jumat lalu (30/12/2022). Dengan begitu, pemerintah tidak lagi memberlakukan pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat seiring situasi pandemi COVID-19 yang terus terkendali. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi keberhasilan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam mengendalikan wabah pandemi.

"KPC-PEN yang dinahkodai langsung oleh Menko

Perekonomian RI Bapak Airlangga Hartarto terbukti sukses membawa Indonesia lolos dari krisis akibat pandemi COVID-19. Berkat respon cepat melalui kebijakan gas dan rem, kita tidak hanya mengendalikan pandemi. Tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi. Bahkan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi dibandingkan negara lain," urai Puteri dalam keterangannya.

Pemerintah menyebut keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan situasi pandemi yang semakin terkendali. Berdasarkan data per 27 Desember 2022, kasus harian tercatat hanva 1.7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) 4,79 persen,

dan angka kematian 2,39 persen.

"Ini tidak terlepas dari upaya KPC-PEN dalam memutuskan pengadaan vaksin dan percepatan program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kekebalan imunitas. Bahkan saat ini jumlah vaksinasi telah mencapai sekitar 448 juta dosis. Ini yang membuat tingkat kekebalan komunitas kita sudah sangat tinggi mencapai di atas 98,5 persen, berdasarkan sero survei pada Juli 2022," ungkap Politisi F-Partai Golkar ini.

Meski pemerintah mencabut kebijakan PPKM, Puteri mengajak masyarakat untuk tidak terlena dan senantiasa mewaspadai risiko penularan pandemi COVID-19. "PPKM memang berakhir, tetapi virus ini masih ada. Artinya, tetap ada risiko penularan. Makanya, kita perlu cegah dengan penggunaan masker di ruang tertutup dan keramaian, Serta, terus perluas cakupan vaksinasi untuk tingkatkan imunitas," lanjut Puteri.

Puteri berharap keputusan ini nantinya dapat semakin mendorong pergerakan mobilitas penduduk sehingga berdampak pada percepatan roda pemulihan ekonomi daerah dan nasional. "Ini jadi momentum untuk semakin memperkuat tren pemulihan ekonomi dalam negeri yang sedang berlangsung. Apalagi tahun depan, kita dihadapkan dengan risiko pelemahan ekonomi global. Harapannya, ketika mobilitas meningkat maka konsumsi semakin kuat. Dengan begitu, ekonomi kita bisa semakin tangguh dan solid," tutup Puteri. ---- ann/aha





Kebijakan Baru Perpajakan Belum Berpihak Pada Masyarakat Menengah Bawah

nggota Komisi XI "Tetapi justru sebaliknya, pada PP DPR RI Anis Byarwati ini range masyarakat berpenghasilan menvoroti PP Nomor di atas Rp 5 iuta hingga 20 iuta per 55 Tahun 2022 bulan dikenakan pajak sebesar 15%, tentang Penyesuaian menjadi kurang adil, masih banyak Pengaturan di Bidang Pajak kalangan pekerja dan milenial yang Penghasilan, menurutnya fresh graduate yang berpenghasilan sedikit di atas Rp5 juta, dikenakan Pendapatan Tidak Kena Pajak tarif pajak cukup besar 15%," kata Anis di Jakarta sebagaimana pernyataan tertulis yang

Politisi PKS tersebut mengatakan bahwa kebijakan perpajakan ini kurang tepat diberlakukan sekarang, daya beli masyarakat masih rendah dan belum pulih. Tingkat inflasi meningkat tajam, harga kebutuhan pokok vang terus naik dan tidak stabil. Menurutnya saat ini, uang gaji sebagian pekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Anis menyinggung usulan POKS pada 2019 terkait batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp8 juta per bulan atau kumulatif Rp96 juta per tahun. Artinya, karyawan yang menerima penghasilan atau gaji Rp8 juta kebawah terbebas dari PPh. Menurutnya usulan ini memberikan ruang perlindungan yang luas kepada masyarakat berpenghasilan menengah-bawah yang masih berada pada kondisi pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

"Untuk merangsang perekonomian ke arah yang lebih baik, seharusnya Pemerintah menggunakan instrumen fiskal secara selektif diantaranya pemotongan pajak, untuk golongan pekerja berpendapatan tertentu. Bukan malah sebaliknya, dengan menerapkan pajak yang tinggi bagi golongan menengah-bawah," ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI ini.

Menurut Anis ada beberapa catatan terkait kebijakan penyesuaian pajak penghasilan tersebut antara lain: perekonomian Indonesia stagnan dalam kurun lima tahun terakhir, Indonesia pernah memasuki fase resesi ekonomi selama empat triwulan atau satu tahun.

"Perekonomian nasional masih menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi global saat ini, terlihat dari banyaknya PHK dan penutupan usaha, juga imbas kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2022, masih sangat memengaruhi tingginya harga berbagai kebutuhan pokok yang kian memberatkan masyarakat," tukasnya. 🗫 uc/aha



Perppu Cipta Kerja Berpotensi Cederai Ketundukan Terhadap Hierarki Perundang-Undangan

nggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tidak tepat lantaran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sendiri, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), diminta untuk dilakukan perbaikan. Diketahui. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu diteken Presiden RI Joko Widodo.

perundang-undangan di negeri ini," tegas Ledia Hanifa Amaliah dalam rilis yang diterima tim Parlementaria, Selasa (3/1). Lebih lanjut Ledia menjelaskan bahwa ketika UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada November 2021, dalam keputusannya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

> "Jadi MK secara lugas memerintahkan kepada



Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

amanah perintah perbaikan Undang-Undang tersebut bersama DPR. Presiden Jokowi malah menerbitkan produk hukum baru berupa Perpu. Yang diamanahkan apa, yang dikerjakan apa," tegasnya.

Langkah Presiden ini, menurut Ledia, juga menunjukkan betapa pemerintah itu malas. menggampangkan pelanggaran terhadap hierarki perundangundangan. Padahal pemerintah masih punya waktu satu tahun untuk melaksanakan perintah MK memperbaiki UU Cipta Kerja.

"Dimana (perbaikan) itu melibatkan publik dan membahasnya bersama DPR, tetapi yang dipilih secara sadar justru menerbitkan Perppu, yang berarti mengabaikan perlunya pelibatan publik, abai pada ketundukan pada hirarki perundang-undangan yang menurut UUD NRI 1945 pasal 20 avat 1 dan 2 memiliki kuasa membentuk Undang-Undang bersama Presiden," tegasnya.

Ledia pun mendorong DPR menolak Perppu ini dan meminta pemerintah taat pada perintah MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. la juga meminta pemerintah lebih membuka partisipasi publik, dengarkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan, duduk bersama DPR membahas UU demi kepentingan rakyat. "Itu baru langkah demokratis yang berlandaskan nilai Pancasila, musyawarah mufakat. Jangan menutup tahun dengan menjadi pemerintah yang otoriter, pro pengusaha dan meninggalkan rakyat," tutupnya. 🗪 hal/aha





Kunjungan Menteri Israel ke Al-Aqsa Dinilai Provokatif dan **Intimidatif**

etua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Fadli Zon turut mengecam Kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, ke Kompleks Masjid Al-Agsa di Yerusalem Timur pada Selasa (3/1/2023). Menurutnya, tindakan Menteri Keamanan Nasional Israel itu provokatif dan intimidatif.

"Tindakan Menteri Itamar itu provokatif dan intimidatif sekaligus ancaman nyata bagi masa depan perdamaian Palestina dan Israel. Dewan Keamanan PBB tidak cukup mendiskusikan tindakan itu. PBB harus bertindak nyata," desak Fadli dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (5/1).

Fadli Zon juga menolak keras kegaduhan yang disulut Itamar tersebut. "Kunjungan itu harus dikutuk. Komunitas internasional harus melakukan aksi konkret untuk mencegah kunjungan provokatif seperti itu ke depan. Israel harus diberikan sanksi keras. Jika diperlukan, Israel harus dikucilkan dari pergaulan internasional,"

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, di sisi lain, mengingatkan dua konsekuensi atas kunjungan teranyar politisi garis keras sayap kanan Israel itu ke Al-Aqsa. "Pertama, kunjungan itu berpotensi memicu meletusnya kembali kekerasan di Kompleks Al-Aqsa secara khusus dan di wilayah Palestina secara umum. Kedua. ini



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Fadli Zon.

merupakan ancaman sangat serius atas status quo Al-Aqsa," ungkapnya.

Sebelumnya, pada bulan April 2023, lebih dari 200 orang terluka di Kompleks Al-Aqsa lantaran provokatif ekstremis Yahudi. Terkait status quo Al-Aqsa, Fadli Zon menjelaskan bahwa sejak 1967 telah ditetapkan status quo atas Al-Aqsa, di mana orang-orang Yahudi tidak boleh berdoa di kompleks Masiid Al-Agsa dan hanya Muslim yang boleh beribadah di tempat suci tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI itu turut menyoroti peran Yordania sebagai

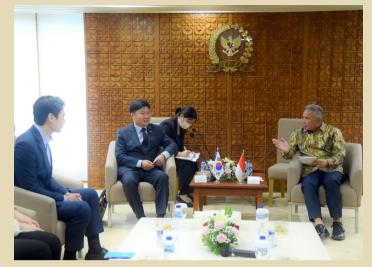
kustodian atau pemelihara Al-Aqsa yang semakin tidak efektif. Untuk itu perlu penguatan kembali peran kustodian Yordania atas Al-Aqsa yang saat ini sekadar simbolis.

"Al-Aqsa di wilayah Yerusalem Timur sekarang sepenuhnya di bawah kontrol Israel. Di sisi lain, Yordania tidak memiliki kontrol apapun atas wilayah itu. Jelas, Yordania tidak bisa melindungi Al-Aqsa secara maksimal. Ini situasi yang paradoks. Komunitas internasional harus mengubah situasi ini," pungkasnya. 🗫 gal/rdn











Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir foto bersama usai menerima Delegasi Komisi Transportasi, Infrastruktur dan Agraria Parlemen Korea Selatan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1/2023). FOTO: RUNI/PDT





Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Delapan fraksi di DPR RI saat menggelar Konferensi Pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. FOTO: RUNI/PDT





Panitia Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 MPR RI-DPR RI-DPD RI diwakili Anggota DPR RI Willy Model Yoseph dan Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 MPR RI-DPR RI-DPD RI secara resmi menggelar kunjungan ke kediaman Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Widya Chandra, Jakarta, Rabu (11/1/2023). FOTO: JKA/PDT









